

**SISTEM PENGAWASAN (*MONITORING*) TERHADAP
PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DIMASA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Tentang Pengawasan Penyaluran BPNT Di Kelurahan Kelapa Tiga
Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2021)**

(Skripsi)

Oleh

Yola Maldini

NPM 1716041088



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

SISTEM PENGAWASAN (*MONITORING*) TERHADAP PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI MASA PANDEMI *COVID-19*

(Studi Tentang Pengawasan Penyaluran BPNT Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2021)

OLEH:

YOLA MALDINI

Bantuan Sosial yang memberikan kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Kelurahan Kelapa Tiga Desa Kaliawi Tanjung Karang Pusat, merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program bantuan non tunai (BPNT) dari pemerintah. Temuan peneliti terdapat kesenjangan dari penerimaan program bantuan non tunai tersebut, untuk itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan system pengawasan penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti memfokuskan pada system pengawasan yang dilakukan oleh dinas social kelapa tiga, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan teknik reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian system pengawasan dilaksanakan secara ketat dan terstruktur oleh pihak terkait, dalam system pengawasan dilakukan juga pelatihan bagi tim pengawas, survey dan evaluasi program serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Kata Kunci: Bantuan Non Tunai (BPNT), Kebijakan Public, Sistem Pengawasan

ABSTRACT

MONITORING SYSTEM FOR THE DISTRIBUTION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAMS (BPNT) DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(Study on the Supervision of BPNT Distribution in Kelapa Tiga Village, Tanjung Karang Pusat District in 2021)

BY:

YOLA MALDINI

Social assistance that provides to the community is actually not a new thing done by the government. The Non-Cash Food Assistance Programme (BPNT) is a non-cash food social assistance from the government that is given to beneficiary families (KPM) every month. Kelapa Tiga Village, Kaliawi Village, Tanjung Karang Pusat, is one of the areas that received a non-cash assistance programme (BPNT) from the government. Researchers found that there were gaps in the receipt of the non-cash assistance programme, so this study aims to describe the supervision system for the distribution of non-cash food assistance programmes (BPNT) in Kelapa Tiga Village. This research uses a qualitative approach where researchers focus on the supervision system carried out by the Kelapa Tiga social service, data collection techniques through interviews and documentation, with data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research supervision system are carried out strictly and structured by related parties, in the supervision system there is also training for the supervisory team, surveys and programme evaluations and involves the community in the supervision process.

Keywords: Non-Cash Assistance (BPNT), Public Policy, Monitoring System

**SISTEM PENGAWASAN (*MONITORING*) TERHADAP PENYALURAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI MASA PANDEMI
*COVID-19***

**(Studi Tentang Pengawasan Penyaluran BPNT Di Kelurahan Kelapa Tiga
Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2021)**

Oleh

YOLA MALDINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

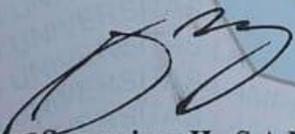


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **SISTEM PENGAWASAN (*MONITORING*) TERHADAP PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI MASA PADEMI *COVID-19*. DIKELURAHAN KELAPA TIGA TANJUNG KARANG PUSAT TAHUN 2021**

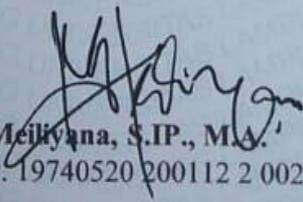
Nama Mahasiswa : Yola Maldini
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716041088
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Siman Sumanjyo H., S.A.N., M. PA.
NIP. 19810628 200501 1 003


Dewie Brima Atika, S. IP., M. Si.
NIP. 19821212 200801 2 017

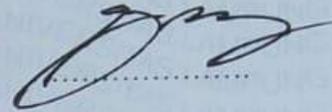
2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Mellyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

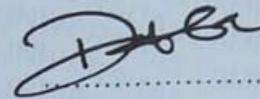
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

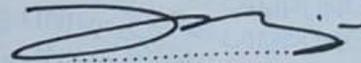
Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M. PA.**



Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S. IP., M. Si.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Yola Maldini

NPM. 1716041088

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Yola Maldini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tjik Nanang dan Ibu Neneng Hairunisah. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Asiyah di Jakarta Utara, yang diselesaikan pada Tahun 2005.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sukajawa Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014 dan meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Melalui Jalur PMPAP. Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota pada bidang Danus pada tahun 2019/2020, Pada bulan Januari 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus selama 40 hari serta penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bulan Juli 2020 selama 30 hari.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT, sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus, saya bisa menyelesaikan Skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ayahanda Tjik Nanang

dan

Ibunda Neneng Hairunisah

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang kalian panjatkan di setiap sujud. Terimakasih untuk pengorbanan, dan kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan kepada saya. Saya selalu bersyukur kepada Allah Swt karenadilahirkan dari orangtua yang hebat seperti papa dan mama.

Adik-adikku Tersayang Zidan Rio Ferdinan dan Daffa Benzema Terimakasih untuk dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membuat papa dan mama bahagia.

Seluruh Keluarga besar yang telah mendokan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.

Sahabat-sahabat yang selalu ada dan memberi semangat.

Terimakasih Seluruh Dosen Yang sangat berjasa, membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat. Pengalaman berharga ini tidak akan saya lupakan.

**Serta
Almamater tercinta
Universitas Lampung**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar Rad 11)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”

(Surat Yusuf Ayat 87)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Surat Al-Baqarah Ayat 286)

“Mendung hari ini bukan berarti selamanya, jangan pernah menyerah.”

(Anonim)

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Sistem Pengawasan (*monitoring*) terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di masa covid-19.

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati , penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Untuk orang yang paling berharga dalam hidupku yaitu papaku Tjik Nanang dan Almh Mamaku Neneng Hairunisah, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi, perhatian dan doanya serta kerja keras mamah dan papah dalam membantu saya meraih gelar sarjana. Semua yang terlewati bukan perjalanan yang sangat mudah. Oleh karena itu, aku persembahkan ini untuk kalian;
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing pertama Penulis. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan ilmu, masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Bapak Simon dalam membimbing saya selama ini membawa keberkahan dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal;

3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen kedua. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan ilmu, masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu Dewie dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal;
4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen penguji, Terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya, untuk ketelitiannya dalam mengoreksi skripsi penulis, banyak memberikan ilmu, masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Professor dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal;
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Arif Sugiyono, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Robi Cahyadi, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, banyak memberikan ilmu, masukan, arahan, waktu dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Ibu Meiliyana dalam membimbing saya selama ini membawa keberkahan dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal;
10. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

11. Seluruh Dosen Administrasi Negara tanpa ketercuali, terimakasih telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis;
12. Mba Wulan dan Mba Uki selaku staf Jurusan Administrasi Negara, terimakasih sudah membantu segala proses administrasi penulis baik dalam perkuliahan maupun kelancaran dalam proses skripsi. Semoga dapat terbalaskan dengan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT;
13. Kepada Keluarga Besar Hi Husin Penulis yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material, selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung;
14. Kepada Uju Tia, Om Wahyu, Bunda Endang, Tante Pelita, Tante Nur, Tante Sepni terimakasih telah memberikan Doa, dukungan serta membuat penulis menjadi bersemangat selama ini;
15. Kepada Mbak Sinta, Mbak Aya, Mbak Rani dan Om Ade yang selalu memberikan penulis, Doa dan Motivasi, banyak pembelajaran selama penulis berkuliah hingga selesai;
16. Kepada Tante Fitri, Mama Yani, Tante Ela, Kakak Nindy Terimakasih telah memberikan Doa yang terbaik kepada penulis serta memberikan dukungan dan semangat selama ini;
17. Kepada Nyai Macik, Nyai Endo, Andung, Datuk Mangca, Datuk Udo, Datuk Paksu. penulis berterimakasih atas doa yang diberikan serta support yang selalu penulis terima;
18. Kepada sahabat-sahabatku Lina, Nanda, Aila, Aprilia, Sulis, Lala, Dela, Ines, Dinda, Lita, Ayu. Terimakasih telah memberikan dukungan semangat semoga kita sampai until jannah;

19. Kepada adik-adik yang tersayang Azzam, Razima, Habib dan Azizah yang selalu menemaniku, semoga kalian diberikan kesehatan ;
20. Sahabatku Rika Selvina Sari, Terimakasih telah selalu bersedia untuk direpotkan oleh penulis, terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
21. Sahabat kelasku Masyitoh, Safira, Rizki, Aulia, Viuly. Terimakasih untuk semuanya, terimakasih telah menjadi teman berjuang selama ini dari amal perkuliahan hingga telah memiliki jalan baru masing masing, sukses selalu untuk kalian semua;
22. Sahabatku Fitri, Elda, Ratih, dan Chindy, Putri. terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini, mendengarkan keluhan penulis tanpa menghakimi, membantu penulis mencari ide-ide selalumenemani penulis disaat penulis merasa Sedih;
23. Sahabat-sahabatku Via, Adinda, Dianya, Nova. Teman Seperjuangan, Terimakasih untuk kita semua yang telah bertahan untuk menyelesaikan pendidikan ini untuk masa depan yang lebih baik, terimakasih telah saling menguatkan disaat kita sama – sama kehilangan arah, terimakasih sudah ada, berbagi, dan bertahan, kita pasti akan bebas dari semua ini;
24. Teman-teman seperjuanganku di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi teman berjuang pada masa perkuliahan dari awal hingga saat ini. Semoga segala urusan kalian selalu dimudahkan;

25. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua;
26. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah belajar dari kegagalan, sudah berusaha semaksimal mungkin dan memperikan terbaik tumbuh dan terus bergerak maju tanpa menyerah. Aku berjanji untuk selalu menghargai proses, menghormati pencapaian, dan mencintai diriku sendiri;

Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Yola Maldini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	5
I. PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kebijakan Publik	13
2.2.1 Defenisi Kebijakan Publik	13
2.2.2 Tahapan Publik	15
2.3 Konsep Pengawasan.....	17
2.3.1 Indikator Pengawasan Program	21
2.3.2 Fungsi Monitoring Dalam Analisis Kebijakan.....	21
2.3.3 Tujuan Pengawasan	23
2.3.4 Jenis Pengawasan	23
2.3.5 Teknik Pengawasan.....	25

2.4	Program Bantuan Non Tunai (BPNT).....	26
2.4.1	Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	26
2.4.2	Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	27
2.4.3	Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	27
2.4.4	Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	27
2.4.5	Standar Operasional Prosedur (SOP) BPNT	28
2.5	Landasan Teori Kesejahteraan Sosial	28
2.5.1	Pengertian Kesejahteraan	28
2.5.2	Komponene Kesejahteraan Sosial	30
2.5.3	Indikator Kesejahteraan	31
2.5.4	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	32
2.6	Kerangka Pikir	33
III.	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
3.2	Fokus penelitian.....	35
3.3	Lokasi penelitian.....	36
3.4	Jenis dan Sumber data.....	37
3.4.1	Jenis Data	37
3.4.2	Sumber data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1	Wawancara	38
3.5.2	Dokumentasi	38
3.6	Teknik Analisis Data	39
3.6.1	Reduksi Data	39
3.6.2	Penyampaian Data.....	40
3.6.3	Penarikan Kesimpulan.....	40
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	40
3.7.1	Perpanjangan Periode Pengamatan.....	41

3.7.2	Ketekunan/Konsistensi Pengamatan	41
3.7.3	Dalam Uji Reliabilitas.....	41
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	43
4.1.2	Dasar Hukum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	44
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	44
4.1.4	Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	44
4.2	Sejarah Singkat Kelurahan Kelapa Tiga.....	49
4.2.1	Kondisi Geografis	49
4.2.2	Nama-Nama Pejabat Lurah Kelapa Tiga.....	50
4.2.3	Kondisi Demografi.....	50
4.2.4	Data Penerima BPNT di Kelurahan Kelapa Tiga	52
4.2.5	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	54
4.2.6	Syarat Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	56
4.3	Hasil Penelitian	57
4.4	Pembahasan	71
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah RT dan KK Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2021	3
Tabel 2 Jumlah Penerima Dan Tidak Penerima BPNT Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2021	4
Tabel 3 Penelitian terdahulu.....	10
Tabel 4 Daftar wawancara	38
Tabel 5 Sumber Dokumentasi	39
Tabel 6 Nama-Nama Lurah Kelapa Tiga	50
Tabel 7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	50
Tabel 8 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 9 Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	51
Tabel 10 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Usia	51
Tabel 11 Jumlah Penduduk Kelurahan Kelapa Tiga.....	52
Tabel 12 Data jumlah penerima BPNT di lingkungan I (Makmur).....	53
Tabel 13 Data jumlah penerima BPNT di lingkungan II (Sudarmono).....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Kerangka Pikir	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, pada tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. Begitu juga dengan daya beli masyarakat yang ikut menurun seiring dengan lesunya perekonomian. Di tengah wabah saat ini, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik merupakan bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya mengatasi dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan terkena dampak sosial juga ekonomi (Wulansari & Subriadi, 2017).

Setelah Wabah COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak (Gorbiano et al, 2020). Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Belum lagi akibat penurunan penghasilan tersebut, angka kriminalitas bertambah sehingga pemerintah akhirnya memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait COVID-19 (Rahmansyah et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19, Sepanjang semester I-2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi COVID-19 dengan titik berat pada sektor kesehatan, Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020. Pemerintah juga melanjutkan program Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga. Besaran bantuan Rp200 ribu per bulan hingga Desember 2020, dan juga Bantuan tunai Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan, beras jagung, lauk pauk sayuran dan keperluan lainnya yg bermanfaat menghadapi COVID-19 (Macpal et al., 2021).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana di suatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Rahmansyah et al., 2020).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di *e-warung* yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BNI,BTN,dan Mandiri). Kelurahan Kelapa Tiga Desa Kaliawi Tanjung Karang Pusat, merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program bantuan non tunai (BPNT) dari pemerintah, dengan jumlah populasi dari 12 RT di lingkungan I (Makmur) dan Lingkungan II (Sudarmo) diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah RT dan KK Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Lingkungan I (Makmur)			Lingkungan II (Sudarmono)		
No	Nama RT	Jumlah KK	No	Nama RT	Jumlah KK
1	Rahman Nur	63	16	HeruGunawan	41
2	M. Ali	22	17	M. Rosid	68
3	R. Ahmad Yani	60	18	Supana.SM	53
4	Ronggo Warsito	55	19	Azwir	86
5	Mujianto	69	20	Dede Ars	143
6	Usman	51	21	Davit Andriansyah	75
7	Agus Tomi	56	22	Noviansyah	101
8	Andri Dahlan	50	23	Setia Budi Yusuf	105
9	Tjik Nanang	59	24	Julius Al Johari	86
10	Suhenri. MZ	36	25	Uci Sanusi	76
11	Romi Asmara	35	26	Agus Junaidi	105
12	Djoko Setiawan	46	27	Murhasan	80
13	Novi Indriani	53			
14	Wibowo. S	60			
15	Sukadi	87			

Sumber : data sekunder Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Tahun 2021

Data tabel 1 menjelaskan terdapat 1.821 kepala keluarga, dengan 27 RT dari 2 lingkungan yang ada di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Tahun 2021. Dari 1.821 kepala keluarga hanya beberapa kepala keluarga saja yang tercatat sebagai penerima program bantuan non tunai (BPNT).

Hasil observasi yang dilakukan diketahui, tidak meratanya penerimaan program bantuan non tunai (BPNT) disebabkan ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal menjangkau semua pihak yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat.

Adapun penerima bantuan BPNT di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penerima Dan Tidak Penerima BPNT Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No	Jumlah KK	Jumlah Penerima BPNT	Persentase
Jumlah Penerima	1.821	210	11,53
Jumlah Tidak Menerima	1.611	0	88,57
Jumlah	210	210	100

Sumber: data sekunder Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Tahun 2021 diolah Excel (terlampir)

Berdasarkan data tabel 2 penerima BPNT di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat pada Tahun 2021 berjumlah 210 kepala keluarga dari 1.821 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang, dengan persentase 11,53% penerima BPNT, sedangkan 1.611 atau 88,57% kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Karang Pusat tidak terdata sebagai penerima BPNT. Kesenjangan persentase tersebut menunjukkan bahwa, diperlukannya suatu monitoring atau pendampingan terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT) di masa pandemic COVID-19.

Sejalan dengan kesenjangan tersebut Dian Herdiana, 2020 menggemukan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 secara empiris mengalami masalah yaitu adanya kesalahan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang implikasinya banyak warga masyarakat yang seharusnya berhak namun tidak menerima bantuan social, sebaliknya warga yang mampu justru mendapatkan bantuan sosial. Pentingnya upaya pengawasan secara kolaboratif mengingat kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 melibatkan aparatur pemerintah dari tingkat bawah yaitu dari tingkat desa dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sampai dengan pemerintah di tingkat pusat mengenai jumlah anggaran pembiayaan kebijakan tersebut (Herdiana, 2020).

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat, dimana masyarakat penerima bantuan sosial ganda terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan serta Bukan penerima PKH atau BPNT (hasil wawancara dengan pendamping BPNT). Sesuai dengan rencana penyaluran bantuan sosial, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut Non PKH hanya diberikan kepada KPM yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH, namun berdasarkan fakta di lapangan, beberapa kepala keluarga menerima kedua program sosial tersebut (hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan sosial BPNT). Menteri Sosial Tri Rismaharini, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, mengatakan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) bisa mencapai 53 juta karena adanya duplikasi atau double data di Sistem Data Terpadu.

Kesejahteraan Sosial (STKS) milik Kementerian Sosial. Terkait data kemiskinan, Kemensos mengelola STKS terlebih dahulu, selanjutnya data penerima manfaat PKH, BPNT, dan BST. Di sinilah munculnya data ganda dimulai. Permasalahan, jumlah duplikasi data yang cukup signifikan, yang intinya berisi data awal penerima bansos sebanyak 193.002.186 orang. Setelah dilakukan konsolidasi data berdasarkan NIK, nama, dan alamat penerima, jumlah penerima bansos menurun menjadi 155.898.896 berdasarkan data DTKS per 31 Mei, menjadi 140.483.575 berdasarkan data terbaru dari Kemensos per Juni 30, dan kemudian menurun sekali lagi menjadi 139.477.527. Dalam hal ini terjadi pengurangan kurang lebih 53,5 penerima bansos dari data asli ke data terbaru di Risma, Menteri Sosial yang dikutip cnnindonesia.com, mengklaim bahwa penyusutan data adalah hasil dari data penerima yang lebih baik tentang perpindahan penduduk, kematian, kedatangan, dan kelahiran.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210812131928-20-679501/risma-pangkas-53-juta-jiwa-penerima-bansos-karena-data-ganda/amp> diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 14:11)

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih ada meskipun banyak warga lain yang lebih berhak menerimanya, menurut fakta di lapangan. Menunjukkan bahwa penerimaan BPNT masih belum tepat sasaran. Selain itu, masih terdapat permasalahan warga yang menyalahgunakan dana bantuan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan pemerintah agar penerima dana bantuan pangan non tunai (BPNT) menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan gizinya, namun praktik tersebut masih saja terjadi. (Temuan wawancara dengan masyarakat penerima bansos dari BPNT).

Uraian permasalahan yang diangkat di atas menunjukkan bahwa penting untuk memperhatikan bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan di lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : pertama, belum tepat sasarannya penerima bantuan sosial BPNT. kebijakan tersebut memerlukan upaya perbaikan karena belum dapat mencapai tujuannya. Salah satu cara untuk meningkatkan cara penerapan kebijakan adalah dengan menerapkan proses pemantauan. Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli seperti Fachrudin (2004) yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tolok ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, atau alternatifnya, terdapat kesalahan yang ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaannya suatu kegiatan. Kedua, salah sasaran penerima bansos BPNT telah memicu protes dan kekesalan sosial dari mereka yang berhak menerima program, serta menimbulkan suasana mencekam di masyarakat. Menurut Lotulung (dalam Fachrudin 2004), pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, sehingga proses pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebijakan bantuan sosial BPNT akan dilaksanakan seefektif mungkin. Masyarakat, termasuk penerima manfaat maupun masyarakat umum yang berkepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan program, perlu dilibatkan dalam proses pengawasan secara multi aktor. Hal ini mencakup baik internal pemerintahan, yang meliputi level pemerintah pusat hingga level pemerintahan desa/kelurahan, maupun faktor eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh para pihak mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa/kelurahan diharapkan dapat

mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kebijakan bansos BPNT sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai dan tercapai. masyarakat sasaran akan mendapatkan keuntungan dari keberadaan mereka.

Berdasarkan gambaran sistem pemantauan distribusi program BPNT di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat, masih ada keluhan masyarakat terkait bantuan sembako nontunai. Apabila pegawai tidak transparan dalam pengelolaan informasi maka pengurus kepala lingkungan dan pengurus RT mendapatkan bantuan dari warga yang berhak. Banyak kesalahan informasi, misalnya hanya orang yang berhubungan keluarga dengan kepala lingkungan yang terdaftar sebagai penerima manfaat, tetapi bukan anggota keluarga kepala lingkungan yang seharusnya berhak menerima bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tergolong tidak dapat dioperasikan dan tidak didaftarkan oleh pelaksana bantuan (hasil wawancara masyarakat). Terlihat bahwa di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tidak tepat sasaran dan kurang kesadaran penerima manfaat. jangan gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keterkaitan antara upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien dengan sistem pengawasan pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) adalah adanya ketidaktepatan sasaran sehingga penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan dasar. membutuhkan hak dan bagaimana sistem pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non keuangan pada kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat (Fajar Syamsul Ma'ruf 2022). Mengingat pentingnya melaksanakan program sosial pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tengah pandemi ini. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana “Sistem Pengawasan (*Monitoring*) Terhadap Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di masa Pandemi COVID-19. Di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat. ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah di penelitian ini yaitu : Bagaimana sistem pengawasan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan yang telah di jelaskan maka, penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh Deskripsi tentang sistem pengawasan (*monitoring*) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi terutama berkaitan dengan proses, sistem pengawasan (*monitoring*), terhadap penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Seperti penyelewengan dan penyalahgunaan, distribusi yang adil dan merata, responsibilitas pihak terkait, evaluasi dan perbaikan program, dan dapat membangun kepercayaan masyarakat, dan tentunya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi pemerintah adalah kontribusi positif bagi pemerintah dan pelaksana program dalam mengambil keputusan. Pembaca akan diuntungkan dengan mengetahui proses dan sistem Pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat. Seperti Sistem pengawasan yang efektif memungkinkan identifikasi yang akurat terhadap penerima yang memenuhi syarat. Dengan adanya mekanisme verifikasi dan validasi, dapat dipastikan bahwa bantuan pangan disalurkan kepada mereka yang benar-benar

membutuhkan, seperti keluarga miskin, anak-anak, lansia, atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu, Pengawasan sistematis dapat membantu meningkatkan akurasi data terkait penerima manfaat. Dengan adanya verifikasi dan pembaruan secara teratur, informasi mengenai jumlah, identitas, dan kebutuhan penerima dapat diperbarui dengan akurat, Melalui sistem pengawasan yang baik, dapat dilakukan pemantauan terhadap biaya operasional dalam penyaluran bantuan pangan, Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem penyaluran program bantuan pangan dapat meningkatkan efisiensi logistik, Sistem pengawasan memungkinkan pendeteksian cepat terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam penyaluran bantuan pangan. Misalnya, jika ada kesalahan dalam distribusi, pangan yang tidak layak konsumsi, atau praktik penyalahgunaan, dapat segera diidentifikasi dan diambil tindakan yang diperlukan, **Responsibilitas dan Pertanggungjawaban:** Pengawasan yang ketat memastikan responsibilitas dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait dalam penyaluran program bantuan pangan. Staf, lembaga, atau mitra yang terlibat dalam distribusi harus mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bab ini tentang tinjauan pustaka merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian biasanya melakukan tinjauan pustaka untuk menyusun artikel ilmiah guna mendapatkan data yang relevan dan juga dengan tinjauan pustaka dapat membantu peneliti menghindari plagiarisme tinjauan pustaka merupakan salah satu cara untuk menghindari mengulang penelitian lain dengan subjek dan tujuan yang sama. Untuk menghindari hal tersebut, penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3 Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Ika Surya K. dan Weni Rosdiana (Universitas Negeri, Surabaya, 2018)	Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.	menunjukkan bahwa skala dan tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal karena masalah mekanisme EDC, yang dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, keuangan, dan keuangan yang tersedia cukup untuk mendukung pelaksanaan program. Karena permusuhan mereka yang berkelanjutan, agen pelaksana kurang memiliki	Sistem monitoring pelaksanaan program secara umum di suatu lingkungan menjadi pokok bahasan penelitian penulis, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bantuan sembako nontunai melalui E-warung. Kedua kajian ini membahas program pemerintah, khususnya bantuan pangan nontunai. Oleh karena itu, penelitian penulis menambah referensi persamaan variabel penelitian yang keduanya membahas

			sikap pelayanan publik yang baik. Keadaan sosial dan ekonomi individu yang kurang pengetahuan menghalangi mereka untuk mendukung program bantuan.	program bantuan sembako nontunai, yang dapat memberikan referensi tambahan untuk penulisan penelitian mengenai pelaksanaan program bantuan sembako nontunai.
2	Anisa Rahma Dini (2019)	Efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung	Pengukuran persentase terhadap empat indikator efektivitas program, khususnya ketepatan sasaran yang dicapai penelitian dengan nilai 62 persen, menempatkan program dalam kategori efektif. program, persentase sosialisasi tertinggi, 44%, menurut penelitian cukup efektif. Pemantauan program berhasil dalam 56% kasus, dan tujuan program berhasil dalam 79% kasus.	Fokus kajian ini pada sistem pengawasan pelaksanaan bansos BPNT menjadi penting. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak hanya berfokus pada sistem pemantauan, tetapi juga pada bagaimana program BPNT dilaksanakan selama pandemi Covid 19.

3	Yeen Gustiance (2019)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/Sdgs</i>) Di Kota Bandar Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras sudah sesuai dengan mekanisme tahapan pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018. Akibat peningkatan isu zero balance dan isu teknis pelaksanaan yang tidak sesuai, pelaksanaan BPNT berdasarkan tujuan program belum membuahkan hasil yang optimal.	Pelaksanaan BPNT dinilai berdasarkan enam faktor, dan program tersebut cukup memadai dan akurat. Selain itu, efektivitas sasaran masih di bawah standar, begitu pula distribusi penerima manfaat dan daya tanggap terhadap isu, serta efisiensi waktu distribusi dan jumlah e-warong. Mekanisme pelaksanaan harus diperbaiki dan diselesaikan agar dapat mendukung pelaksanaan program BPNT tahun berikutnya sesuai dengan tujuan program.
---	-----------------------	--	--	--

Sumber: *diolah peneliti tahun 2021*

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Defenisi Kebijakan Publik

Secara umum, politik dapat diartikan sebagai keputusan berdasarkan pilihan. Kebijakan adalah pilihan tindakan yang muncul dari berbagai alternatif yang tersedia, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh dan mengarah pada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memecahkan masalah publik di segala bidang kehidupan. Melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menegakkan peraturan-peraturan tertentu yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang melintasi sisi baik dan buruk masyarakat. Beberapa definisi dari para ahli kebijakan publik, berikut penjelasannya, adalah sebagai berikut:

Menurut Chandler dan Plano (1988), kebijakan publik adalah penggunaan sumber daya yang tersedia secara strategis untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sekali lagi, kebijakan publik dipandang sebagai campur tangan pemerintah yang terus menerus untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan skala besar.

Menurut Federick, kebijakan mengacu pada serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan. untuk mencapai tujuan tertentu.(Taufiqurokhman, 2014) Menurut Robert Eyestone dikutip Leo Agustino (2008; 6) mengacu pada “hubungan antar satuan negara dan lingkungannya” sebagai definisi ketertiban umum. Karena kebijakan publik dapat mencakup banyak hal, definisi ini sering diartikan terlalu luas bagi banyak orang.

Nugroho mengatakan bahwa tatanan umum memiliki dua ciri:

1. Kebijakan publik berarti apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, sehingga mudah dipahami;
2. Karena ukurannya jelas, kebijakan publik mudah diukur. seberapa jauh tujuan telah dikembangkan.

Para ahli di atas telah sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah : serangkaian keputusan politik yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Berbagai ahli dan tokoh menawarkan berbagai konsep terkait kebijakan publik Easton (1969) (dalam Tangkilisan, 2003:2)menganggap kebijakan publik sebagai penugasan nilai-nilai kekuatan yang mempersatukan semua makhluk. Oleh karena itu, fakta bahwa pemerintah mampu bertindak atas nama masyarakat dan hal itu merupakan bentuk pilihan pemerintah yang memberi nilai tambah bagi masyarakat sudah cukup. Anderson (1975) (Dalam Tangkilisan 2003:2), juga memberikan definisi tentang kebijakan publik, yaitu para pakar dan individu berbeda pemahamannya tentang kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan pemerintah yang dirumuskan oleh para pejabat dan lembaga, maknanya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap bagian dari kebijakan publik memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang disengaja.
- b. Tindakan pemerintah termasuk dalam kebijakan publik.
- c. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukannya.
- d. Kebijakan publik dapat bermanfaat karena merupakan tindakan pemerintah terhadap isu-isu tertentu atau merugikan karena merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Dalam arti positif, kebijakan pemerintah didasarkan pada hukum dan peraturan yang harus diikuti.

2.2.2 Tahapan Publik

Proses kebijakan dibagi menjadi tiga proses yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi (Putt dan Springer). Tiga proses politik yang diusulkan dijelaskan sedemikian rupa sehingga kepentingan umum politik sebagai proses pemerintahan dapat dipahami dengan baik.

1. Formulasi Kebijakan

Menurut Syafaruddin (2008: 81-83) pembuatan kebijakan pemerintah mencakup kegiatan politik. Dalam hal ini, kegiatan politik dimaknai menjadi proses pengambilan keputusan secara visual. Penetapan agenda, pengembangan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan hanyalah beberapa dari tahapan kegiatan kebijakan yang saling berhubungan. Tindakan yang direncanakan dipandu oleh sejumlah elemen penting dalam perumusan kebijakan. Isi kebijakan tersebut antara lain:

- a. Kepentingan yang akan dipengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pembuat kebijakan
- e. Siapa yang akan melaksanakan program
- f. Sumber daya yang akan digunakan

2. Implementasi Kebijakan

Edward mengidentifikasi empat aspek penting dari implementasi kebijakan: Komunikasi, sumber, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi. Ada dua langkah yang mungkin dalam proses penerapan kebijakan: implementasi langsung melalui program atau kebijakan yang berasal dari kebijakan atau kebijakan publik. Peraturan daerah dapat berupa peraturan/kebijakan penjelas atau seringkali peraturan pelaksanaan khusus dalam hal ini. Kebijakan publik juga dapat mempresentasikan proses implementasi kebijakan dalam bentuk undang-undang.

Implementasi atau penerapan kebijakan dalam kerangka manajemen berlangsung dalam kerangka organisasi, kepemimpinan dan pengendalian,

setelah perumusan kebijakan, tugas selanjutnya merupakan menata, berbagi kepemimpinan dan mengarahkan implementasi. Tahapan model program dan pengelolaan dalam proses implementasi meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Konsep (Perencanaan) Merencanakan dan menetapkan tugas dan mengembangkan tujuan yang jelas, menentukan indikator kinerja utama, biaya dan waktu
- b. Melaksanakan program dengan pendanaan, sumber daya, prosedur, dan metode struktur dan kepegawaian yang tepat.
- c. Menerapkan sistem pengawasan dan fasilitas pengawasan yang sesuai untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dan benar segera diambil.

3. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja; melainkan, itu harus diperiksa pada saat implementasi. Pengawasan harus dilakukan sebagai prosedur pemantauan atau evaluasi kebijakan sebagai bagian dari proses pengelolaan. Menurut penjelasan Sugandi, evaluasi kebijakan adalah proses menilai implikasi atau efek dari berbagai kebijakan program pemerintah. Secara umum, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang melibatkan isi, implementasi, dan evaluasi dampak kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi dianggap sebagai kegiatan operasional, yang menunjukkan bahwa evaluasi politik dilakukan di seluruh proses politik, bukan hanya pada tahap akhir. (Rezky AP, 2021).

Oleh karena itu, tahapan merumuskan masalah strategis, menyarankan program untuk mengatasi masalah strategis, menjalankan program tersebut, dan mencari tahu strategi semuanya dapat menjadi bagian dari evaluasi strategi. N. Dunn memberikan sejumlah kriteria rekomendasi strategi yang analog dengan kriteria evaluasi strategi. Kriteria rekomendasi kebijakan meliputi:

- a. Efektivitas (*effectiveness*) berkaitan Sejauh mana alternatif mencapai hasil yang diinginkan (efek) atau tujuan tindakan adalah ukuran

efektivitasnya. Layanan atau nilai uang selalu digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, yang terkait erat dengan rasionalitas teknis.

- b. Efisiensi (*efficiency*) berkaitan Besarnya usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu berkaitan dengan efisiensi.
- c. Kecukupan (*adequacy*) mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi persyaratan, nilai, atau menyajikan peluang untuk pembuatan masalah.
- d. Pemerataan (*equity*) distribusi efek dan upaya di antara berbagai kelompok sosial, dan ini terkait erat dengan rasionalitas sosial dan hukum.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) Sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat disebut dengan *responsiveness*. Sebuah analisis yang memenuhi semua kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan lainnya masih gagal jika tidak menanggapi kebutuhan sebenarnya dari suatu kelompok kebijakan. Inilah mengapa kriteria daya tanggap itu penting.
- f. Ketepatan (*appropriateness*) Karena persoalan kesesuaian kebijakan tidak terkait dengan kriteria individual melainkan dengan dua kriteria atau lebih secara bersama-sama, maka kesesuaian kriteria kesesuaian terkait erat dengan rasionalitas substantif. (Hariyanto,2017)

Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dengan membandingkan hasil evaluasi dengan perkiraan dan konsistensi dampak antara teori dan praktik kebijakan. Karena kurangnya data dasar untuk dianalisis, penilaian tidak dapat dilakukan tanpa pengawasan apakah penilaian tersebut efektif, ekstensif, atau tidak. Akibatnya, evaluasi dan pengawasan berjalan beriringan. (Hariyanto,2017).

2.3 Konsep Pengawasan

Menurut Mufatiroh, 2020 Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi implementasi program atau kebijakan untuk memastikan bahwa mereka berjalan

sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara pengawasan dan implementasi program atau kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kuantitas implementasi: Pengawasan memastikan bahwa program atau kebijakan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
2. Mencegah pelanggaran: Pengawasan memastikan bahwa program atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga meminimalisir pelanggaran.
3. Mengidentifikasi masalah dan kesempatan peningkatan: Pengawasan membantu mengidentifikasi masalah dan kesempatan peningkatan dalam implementasi program atau kebijakan, sehingga memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas: Pengawasan memastikan bahwa program atau kebijakan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan implementasi program atau kebijakan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Pengawasan program BPNT dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Hal ini meliputi pengawasan terhadap penyediaan dana, pelaksanaan program, distribusi bantuan pangan, partisipasi masyarakat, serta evaluasi hasil dan dampak program.

Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan, yaitu membantu manajemen mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan dengan mengarahkan proses manajemen. Untuk menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, diperlukan pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan bila perlu meningkatkan upaya-upaya sebelumnya. Effendi (2014) mengatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen yang paling penting karena merupakan satu-satunya cara untuk menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan kerja yang terbaik. Sebaliknya, Fahmi (2014) menegaskan bahwa pengawasan secara umum dapat dipandang sebagai sarana yang dengannya suatu organisasi dapat mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yang selanjutnya mendukung pencapaian visi dan

misi organisasi.

Menurut Anwar (dalam Murni 2021) mendefinisikan pengawasan sebagai “pengawasan atau pengendalian kegiatan pejabat pemerintah,” yang diperlukan untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan dilakukan dengan cara yang mencapai tujuan dan mencegah penyalahgunaan. Menurut Atmosudirdjo (2015) mendefinisikan pengawasan sebagai rangkaian kegiatan yang sesuai dengan kriteria, norma, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membandingkan atau mengukur apa yang sedang berlangsung dan apa yang telah dilaksanakan. Tujuan utama pengawasan adalah mengarahkan pelaksana untuk melaksanakan rencana. (Wiranda, 2020) Manulang mengklaim bahwa langkah-langkah berikut ini merupakan proses pemantauan suatu lokasi atau objek:

1. Menetapkan standar untuk alat ukur

Alat atau standar untuk evaluasi kinerja biasanya disertakan dalam rencana keseluruhan dan rencana lainnya. Dengan kata lain, rencana biasanya berisi persyaratan untuk menyelesaikan tugas. Bawahan harus diperlihatkan dan diberitahu tentang alat evaluasi agar mereka dapat memahaminya dengan baik. Bawahan harus menyadari tujuan yang harus dicapai dengan menyelesaikan tugas. Dia bisa tahu kemana arah tindakan jika tidak diumumkan. Standar-standar tersebut dapat dikembangkan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu agar bawahan memahami standar atasannya. Dengan kata lain, ekspektasi kinerja bawahan ditentukan oleh atasan dan bawahan. (Wiranda,2020)

2. Mengadakan Penilaian

Evaluasi merupakan tahap kedua dari proses pemantauan. Hasil aktual evaluasi digunakan untuk membandingkan kinerja bawahan dengan alat ukur (standar) yang telah ditetapkan. Akibatnya, sangat jelas bahwa dua hal diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini: hasil aktual dari pekerjaan bawahan dan standar atau alat ukur. Jika dua dari yang disebutkan di atas ada, mis. Manajemen mampu membuat keputusan ketika hasil aktual dan standar sudah tersedia. Akibatnya, manajer menggunakan perbandingan ini untuk mengidentifikasi penyimpangan dengan membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar. Oleh karena itu, standar mengevaluasi

realitas. (Wiranda,2020)

3. Mengambil tindakan perbaikan

Untuk melakukan perbuatan baik, pertama-tama seseorang harus menyelidiki alasan perbedaan tersebut. Tindakan korektif harus diambil jika pengemudi sudah mengetahui apa yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Dengan rencana atau standar, tindakan korektif juga dapat mengubah hasil kerja yang sebenarnya. Akibatnya, laporan berkala diperlukan untuk mengidentifikasi penyimpangan sebelum terlambat dan mengambil tindakan korektif untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai rencana. Dalam hal ini tidak memungkinkan, memiliki laporan penyimpangan sangat penting untuk membuat rencana terkait selanjutnya.(Wiranda, 2020).

Berikut adalah tiga aspek dari teori Sujamto (2016) dalam menjelaskan supervisi:

1. Rencana sudah ada. Perencanaan berfungsi sebagai peta jalan untuk berbagai kegiatan organisasi. Karena perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi, maka setiap organisasi mengupayakan perencanaan yang baik dengan harapan dapat mempermudah perencanaan. Implementasi perencanaan optimal setiap organisasi sangat penting bagi organisasi.
2. Ketentuan dan peraturan yang berlaku Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memantau distribusi BPNT sesuai dengan pedoman umum Program Sembako 2020 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). ditetapkan oleh pemerintah pada umumnya. Undang-undang ini diubah menjadi pasal (3) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 dan PP No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Asas efektivitas dan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan Saat mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2.3.1 Indikator Pengawasan Program

Dikutip dalam Kementerian Sosial RI Tahun 2021 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program BPNT Kementerian Sosial RI Tahun 2021. Beberapa indikator pengawasan program BPNT yang dapat digunakan antara lain :

1. Ketersediaan dana: Indikator ini mengukur apakah program BPNT mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Penentuan KPM: Indikator ini mengukur apakah proses pemilihan dan verifikasi calon penerima manfaat (KPM) dilakukan secara objektif dan transparan, serta mengikuti kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penyaluran bantuan pangan: Indikator ini mengukur apakah bantuan pangan yang disalurkan kepada KPM tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi masyarakat penerima manfaat.
4. Monitoring dan evaluasi: Indikator ini mengukur apakah program BPNT dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlangsungan program.

Partisipasi masyarakat: Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program BPNT, baik dalam proses pemilihan KPM maupun pemantauan pelaksanaan program (<https://bpnt.kemensos.go.id/wp-content/uploads/2021/06/1.-Pedoman-Monitoring-dan-Evaluasi-BPNT-Tahun-2021.pdf>).

2.3.2 Fungsi Monitoring Dalam Analisis Kebijakan

1. kepatuhan (*Compliance*) adalah kemampuan untuk menentukan apakah tindakan para pelaksana program, staf, dan pelaku lainnya mematuhi pedoman dan standar yang ditetapkan oleh legislator, lembaga pemerintah, dan organisasi profesi. Pelaku atau pelaksana kebijakan, seperti implementasi penanggulangan kemiskinan oleh BPNT, harus mematuhi peraturan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Pemeriksaan (*auditing*), juga dikenal sebagai inspeksi atau audit, membantu dalam menentukan apakah sumber daya dan layanan yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu atau kelompok sasaran (individu, keluarga, kota,

negara, dan wilayah) benar-benar menjangkau kelompok tersebut. Dinas Sosial yang merupakan *leading sector* di daerah, dan Pendamping BSP (Bantuan Sosial Pangan) merupakan sumber daya dan pelayanan program BPNT Kota Bandar Lampung.

3. Laporan, akuntansi, dan pengawasan memberikan data yang berguna untuk memperkirakan perubahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai program atau kebijakan publik. Penerima manfaat menerima hasil program BPNT yang kemudian digunakan untuk membuat perubahan yang dapat digunakan dalam laporan program.
4. Penjelasan atau pengawasan mengumpulkan data untuk menjelaskan mengapa desain dan implementasi kebijakan publik menghasilkan hasil yang berbeda (Dunn, 2003). Sesuai pedoman yang berlaku, keberhasilan atau kegagalan program akan didasarkan pada hasil pemantauan BPNT. Secara teori, pengawasan kepatuhan dan pengawasan kinerja adalah dua fungsi dasar pemantauan yang terkait. Tujuan pemantauan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa prosedur sesuai dengan rencana dan harapan. Sementara itu, pemantauan kinerja digunakan untuk melacak kemajuan organisasi menuju tujuan yang dimaksud. Laporan kemajuan proses biasanya berisi hasil pemantauan. Metrik deskriptif dan non-deskriptif digunakan untuk mengevaluasi output. Pemantauan output Tujuan pengendalian produksi adalah untuk menentukan apakah proses saat ini memadai. Mekanisme proses atau kegiatan yang dimonitor oleh output monitoring dapat diperbaiki.

Keterkaitan teori pengawasan terhadap kebijakan publik terdapat dalam konteks manajemen *controlling*. Dimana, Dinas sosial kota Bandar Lampung dalam hal ini sebagai organisasi yang memimpin penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) membangun sistem pengawasan (*monitoring*) agar pengawasan yang dilakukan tepat guna dan efektif serta efisiensi dari mendukung terwujudnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemantauan adalah kegiatan ketika kebijakan diimplementasikan. Hal ini karena merupakan sumber utama informasi implementasi kebijakan. Model pemantauan yang dikembangkan oleh William Dunn, yang mendefinisikan pemantauan sebagai aktivitas internal dan berkelanjutan, akan digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan dan hasil program, yang nantinya akan digunakan sebagai penentu atau sumber informasi untuk menentukan apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mewakili sisi internal. Akibatnya, pemantauan menghasilkan kesimpulan yang tepat sebelum dan selama adopsi dan implementasi kebijakan. (Wiwit, 2020)

2.3.3 Tujuan Pengawasan

Pengawasan berfungsi untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Menurut Soekarno, berikut ini adalah tujuan pengawasan:

1. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan berjalan sesuai rencana.
2. Untuk melihat apakah suatu kegiatan mematuhi instruksi.
3. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut.
4. Untuk mengidentifikasi kekurangan dan kesulitan kegiatan
5. Untuk menentukan cara mengatasi kesulitan, kekurangan, atau kegagalan di jalan menuju perbaikan. (Murni, 2021)

2.3.4 Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan, jenis pengawasan dapat dipisahkan menurut tugas atau letaknya. (Murni, 2021) bahwa bentuk pengawasan dapat dibedakan menjadi:

1. Pengendalian Internal Pengendalian yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga yang secara struktural tergabung dalam lingkungan administrasi itu sendiri dikenal dengan pengendalian internal. Seorang bos, misalnya, mengawasi bawahannya.

2. Pengawasan eksternal Eksekutif menciptakan lembaga yang secara struktural independen dari pemerintah untuk melakukan pengawasan. Misalnya, pengawasan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pedoman etika dan perilaku komisi yudisial. (Apriliana, 2021)

Menurut Suadi (2014), jenis dari pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk pengawasan terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar bawahan dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional, merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pejabat atau pejabat yang tugas utamanya membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya, pengendalian operasional biasanya bersifat internal. Perangkat pengawasan operasional kantor disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang ditunjuk . SPI hanya membantu manajer untuk menjalankan kepemimpinan, kontrol atau pengawasan yang melekat dengan benar. SPI tidak memiliki kewenangan tunggal untuk bertindak, harus dikoordinasikan dengan atasan.
3. Pengawasan Legislatif, juga dikenal sebagai pengawasan politik, adalah fungsi parlemen selain fungsi legislatif dan anggaran. Kontrol legislatif bertujuan untuk mengontrol penerapan undang-undang tahun 1945, undang-undang dan peraturan penerapan, yang diwujudkan secara khusus oleh hak angket, penyelidikan, dan mengeluarkan pendapat.
4. Pengawasan masyarakat, juga dikenal sebagai pengawasan sosial, adalah proses dimana masyarakat itu sendiri mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Pengawasan Yudikatif, Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan formal untuk merevisi undang-undang berdasarkan UUD 1945, pengawasan yudisial merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung.

(Apriliana, 2021).

2.3.5 Teknik Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27), ada beberapa komponen yang membentuk teknik pengendalian:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan atau pengawas secara pribadi berkunjung ke tempat kerja untuk mengamati, mencari, dan memeriksa sendiri, di samping menerima laporan langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak langsung adalah ketika laporan diterima secara tidak langsung.
 - b. Pengawasan tidak langsung, seperti memperoleh laporan tertulis dan lisan dari pelaksana, meminta pendapat umum, dan kegiatan sejenis lainnya tanpa pengawasan “on the spot”.
2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
 - a. Pengawasan preventif, yang dimulai sebelum pekerjaan dimulai. Persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan sumber daya manusia, dan lain-lain adalah contohnya.
 - b. Pengawasan represif, yang dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, audit pasca kegiatan, dan permintaan laporan pelaksanaan.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal
 - a. Pengawasan internal dilakukan oleh pengurus organisasi. Kepala setiap unit organisasi memiliki persyaratan dasar untuk membantu manajer senior dalam melakukan pengawasan fungsional, dan pengawasan pada hakikatnya harus dilakukan oleh manajemen senior itu sendiri sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.
 - b. Pengawasan eksternal, Sepanjang mencakup seluruh lembaga negara dan Badan Pengawas Keuangan Negara, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di luar organisasi, seperti pengawasan BPK di bidang keuangan. (Apriliana, 2021).

2.4 Program Bantuan Non Tunai (BPNT)

2.4.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat kepada Penerima Manfaat (KPM) dari keluarga tidak mampu, miskin, dan tidak mampu. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang dibelanjakan keluarga miskin dan tidak mampu untuk pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperkenalkan di beberapa kota pada tahun 2017, sedangkan Rastha mensubsidi program bansos sektor pangan sebelumnya. Selain itu, program Rastha Bersubsidi mengalami reorganisasi total pada tahun 2018 menjadi program bansos pangan yang didukung oleh bansos Rastha dan program gratis. Program bansos Pangan dilaksanakan pada akhir tahun 2019 di seluruh BPNT kabupaten/kota yang belum puas. Pemerintah sedang menggarap BPNT yang menggunakan kartu elektronik yang dikirim langsung ke KPM untuk memberikan bantuan nontunai. KPM menerima bantuan hidup ini melalui sistem perbankan, yang memungkinkan KPM untuk membeli beras dan/atau telur dari e-Warong untuk diet yang lebih seimbang. Sehubungan dengan penguatan jaminan sosial dan peningkatan efektivitas program bansos pangan, program BPNT akan ditransformasikan menjadi program Sembako pada tahun 2020. Tarif subsidi yang sebelumnya Rp110.000/km/bulan, dinaikkan menjadi Rp150.000/bulan. KPM/bulan sebagai bagian dari program Sembako.

Selain itu, berbeda dengan program BPNT, program Sembako memungkinkan pembelian produk yang lebih beragam dari sekedar beras dan telur. Pemerintah berupaya agar KPM bisa mendapatkan sembako lainnya dengan cara ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa garis kekurangan pangan (GKM) merupakan faktor yang signifikan dalam pembentukan garis kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas pangan pokok berdampak pada laju penurunan kemiskinan. Program BPNT membantu keluarga berpenghasilan rendah menghemat uang untuk makanan dengan mempermudah mereka memenuhi beberapa kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, program pengembangan gizi ini dapat membantu masyarakat untuk makan lebih baik, terutama bagi anak-anak di usia muda, yang akan membantu mengurangi *stunting*.

2.4.2 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- 3 Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengaduan Tentang Administrasi Negara
- 5 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Bantuan Fakir Miskin.
- 6 UU No. Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 7 UU Pemda No. 23 Tahun 2014 (Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin).

2.4.3 Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berikut tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) :

1. Dengan memenuhi kebutuhan pangan tertentu, meringankan beban biaya KPM
2. Pakan KPM dengan pola makan yang lebih seimbang;
3. Meningkatkan ketepatan, waktu, kuantitas, harga, kualitas dan pengelolaan sasaran; dan
4. Berikan KPM pilihan dan kendali atas cara memenuhi kebutuhan pangannya

2.4.4 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat Program Bantuan Pangan Pokok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM dan mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan distribusi bantuan pendapatan.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Memasukkan transaksi gratis ke dalam agenda Gerakan Nasional Ketidakpuasan (GNNT).
5. Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya usaha mikro dan kecil di sektor komersial.
6. Hindari *stunting* berkepanjangan dengan melengkapi nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

2.4.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) BPNT

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri merupakan inti dari aspek struktur organisasi ini. Hal pertama yang harus dipikirkan adalah mekanisme pelaksanaan kebijakan yang biasanya berupa standar operasional prosedur (SOP). SOP setiap pelaksana berfungsi sebagai pedoman bagaimana bertindak untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan kebijakan terpenuhi selama implementasi. Struktur birokrasi adalah aspek lain. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi cenderung melemahkan kontrol dan menghasilkan prosedur birokrasi yang rumit, membuat fungsi organisasi menjadi tidak fleksibel. *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman bagi petugas di lapangan dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. *Standard Operating Procedure* (SOP) ini selalu dikomunikasikan kepada KPM agar mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran bansos sembako yang benar selain sebagai pedoman bagi KPM dalam penyaluran bansos sembako nontunai. Struktur organisasi yang relatif efektif dan adaptif yang mengawasi dan bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan bantuan sembako nontunai membuat pengawasan pelaksanaannya menjadi lebih mudah. (Agus Wiyaka, 2020).

2.5 Landasan Teori Kesejahteraan Sosial

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat

dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2014) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu:

1. Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang.
2. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
3. Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:

1. Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
2. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
4. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Menurut (Fahrudin, 2014) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak.

2.5.2 Komponene Kesejahteraan Sosial

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. (Fahrudin, 2014) menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

2. Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Pendanaan

Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan

peraturan yang telah di tentukan

5. Perangkat Hukum dan perundang-undangan
Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.
6. Peran Serta Masyarakat
Kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat iitu sendiri.
7. Data dan Informasi
Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara efisien.

2.5.3 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan yang meliputi:

1. Pemerataan Pendapatan
Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak pendapatan yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan perkapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.
2. Pendidikan
Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan dan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan has dari seluruh warga negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga pemerintah

harus melaksanakan pemerataan akses pendidikan

3. Kualitas Kesehatan yang Meningkatkan

Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan artinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan diimbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Tampak perbedaan nyata terhadap penduduk kota dan desa dalam hal kualitas dan akses kesehatan, hal ini disebabkan oleh jarak dalam menuju fasilitas kesehatan.

Tingginya prosentase penduduk perkotaan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena mudahnya akses jarak dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan penduduk pedesaan yang masih sangat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Apa bila masih banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pelayanan kesehatan maka dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut belum mampu memenuhi kesejahteraan.

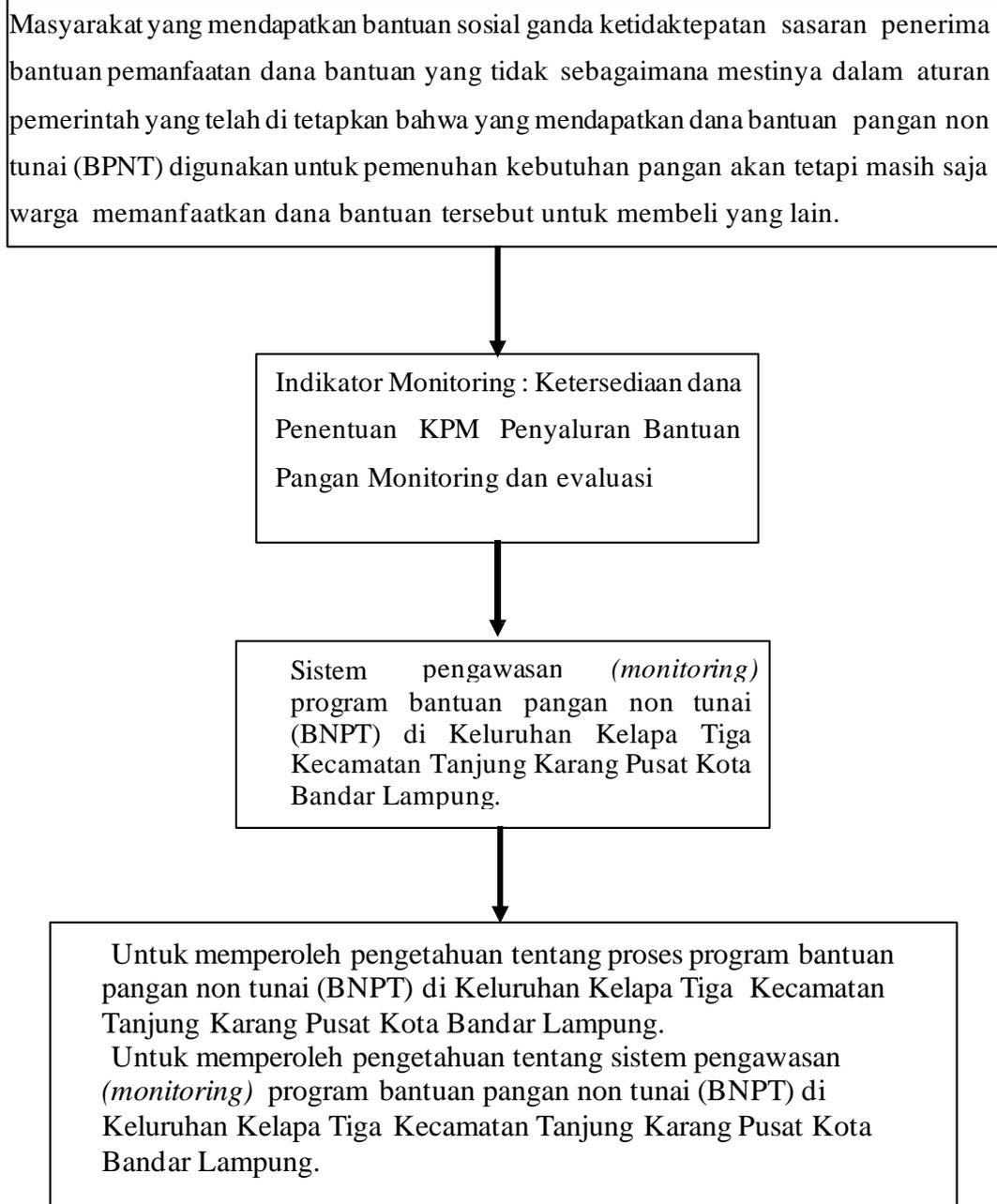
2.5.4 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik. Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2017) yaitu:

1. Standart kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial.
2. Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu.
3. Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik.

2.6 Kerangka Pikir

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin. Memberikan informasi setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat tentang Program Keluarga Harapan (PKH) atau rekening atau kartu elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli sembako, kebutuhan masyarakat E-Warung. Mengurangi beban kebutuhan pangan masyarakat dan memastikan Keluarga Penerima mendapatkan gizi seimbang yang cukup dan tepat waktu merupakan salah satu tujuan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendistribusikan dukungan mata pencaharian yang tepat sasaran, dan mendorong inklusi keuangan. Oleh karena itu, diagram kerangka di bawah ini menunjukkan sistem pengawasan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat:



Gambar 1 Skema Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sifat penelitian kualitatif adalah analitis dan deskriptif. Proses dan makna (dari sudut pandang subjek) lebih penting dalam penelitian kualitatif. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, landasan teori menjadi pedoman. Landasan teori juga menjadi bahan pembahasan hasil penelitian dan memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1998:2) adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan metode statistik atau metode kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Sebagian besar waktu, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi dan sosial, dan banyak hal lainnya. Salah satu alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menentukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode pelaksanaan penelitian yang menghasilkan produksi data tertulis atau lisan deskriptif kualitatif tentang individu dan perilaku yang diamati. Dokumen dan naskah wawancara dengan informan memberikan informasi.

3.2 Fokus penelitian

Tujuan dari fokus penelitian adalah untuk membatasi jangkauan subjek yang dapat dipelajari dan mencegah peneliti terjatuh dalam pengetahuan lapangan. Untuk menentukan bidang penelitian mana yang lebih terfokus pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi ekonomi dan sosial, studi kualitatif

dan pemilihan informasi yang relevan dan tidak relevan dibatasi. Menurut

Sugiyono (2017), tingkat kepentingan, urgensi, dan reliabilitas masalah yang harus dipecahkan terutama menjadi penyebab keterbatasan penelitian kualitatif.

1. Proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meliputi :
 - a. Ketersediaan dana untuk program
 - b. Kepatuhan dalam pelaksanaan program sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku
 - c. Kecepatan dan akurasi dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM
 - d. Kualitas bantuan pangan yang disalurkan
 - e. Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program (<https://bpnt.kemensos.go.id/wp-content/uploads/2021/06/1.-Pedoman-Monitoring-dan-Evaluasi-BPNT-Tahun-2021.pdf>).
2. Sistem Pengawasan penulis berfokus untuk melihat bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial agar bantuan tersebut tersalurkan secara tepat sasaran. Untuk menggambarkan sistem pengawasan tersebut dalam penelitian ini menggunakan teori Situmorang dan Juhir (1994:27) bahwa teknik pengawasan mencakup :
 - a. Pengawasan langsung dan tidak langsung
 - b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
 - c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Menemukan penelitian ini merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan mendirikan tempat penelitian berarti tercapai maksud dan tujuan yang memudahkan penelitian penulis. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi tersebut memiliki hubungan dengan fenomena atau masalah yang akan diteliti. Selain itu, Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan kecamatan yang terletak di Kelurahan Kelapa Tiga yang terdiri dari 27 RT dan II lingkungan.

3.4 Jenis dan Sumber data

Data adalah kumpulan pernyataan atau informasi yang mengandung fakta mentah berupa gambaran dasar tentang suatu hal (objek atau peristiwa) yang ditemukan selama penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Jenis Data

Data primer dan sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data pokok atau data pokok yang dikumpulkan langsung oleh peneliti disebut data primer. Peneliti mengumpulkan sebagian besar informasi dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pemantauan program Bantuan Pangan Non Tunai, termasuk keluarga penerima manfaat, pemilik E-warung, dan pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan program. Peneliti secara langsung menyimak informasi yang disampaikan pada saat wawancara tanya jawab verbal dengan dua orang atau lebih. Sedangkan data sekunder dapat berasal dari sumber tertulis seperti buku, karya ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi terkait penelitian (Bagong Suyanto & Sutinah, 2010). Data sekunder penelitian ini berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian.

3.4.2 Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki pemahaman terbaik tentang apa yang ingin kita ketahui, atau mungkin penguasa untuk memfasilitasi studi peneliti terhadap subjek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengkaji data dari sumber informasi seperti Sugiyono (2013) tersebut di atas. Informan penelitian ini adalah dinas sosial, asisten BPNT. Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu hal yaitu wawancara, yang menjadi responden penelitian ini, orang yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, sumber informasi lainnya adalah melalui dokumen. Dokumen adalah berbagai jenis informasi yang berupa dokumen tertulis atau cetak, rekaman video dan foto dokumentasi yang berkaitan dengan objek dan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Herdiansyah (2013) mengatakan bahwa wawancara adalah cara berkomunikasi dengan dua orang atau lebih dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab. Ketika seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah penelitian, mereka menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan subjek penelitian secara lisan. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui informasi lebih mendalam dari responden dan mengidentifikasi masalah yang memerlukan penyelidikan. Orang-orang berikut akan diwawancarai:

Tabel 4 Daftar wawancara

No	Informan
1	Koordinator pendamping sosial BPNT kecamatan Tanjung Karang Pusat
2	Kepala Dinas Sosial
3	Masyarakat yang terdaftar sebagai KPM program BPNT
4	Sekretaris Camat Dan Kepala Lurah

Sumber: Diolah peneliti tahun 2021

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dan informasi untuk penelitian pertolongan yang berupa buku, arsip, dokumen, dan foto seperti laporan dan data. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Kelapa Tiga di Tanjung Karang Pusat menjadi subjek dokumen penelitian ini.

Berikut dokumen yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5 Sumber Dokumentasi

No	Dokumen
1	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai
2	Permensos Nomor 20 Tahun 2019, tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
4	Pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
5	Petunjuk teknis mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6	Data penerima BPNT di kelurahan kelapa tiga kecamatan tanjung karang pusat

Sumber: dokumen peneliti tahun 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk memberikan makna, signifikansi, dan nilai data, analisis data merupakan langkah penting dalam kegiatan penelitian data. Menurut Kasiram (2010), tujuan analisis data adalah meringkas data dengan cara yang sederhana untuk dipahami dan diinterpretasikan sehingga kaitannya dengan masalah penelitian dapat diselidiki dan dievaluasi. Data kualitatif dianalisis secara interaktif dan terus menerus hingga selesai sehingga data menjadi lengkap. Fungsi analisis data adalah:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data memerlukan meringkas, memilih item yang relevan, berkonsentrasi pada yang signifikan, dan mencari pola dan tema. Menurut Sugiyono (2014), data yang ditargetkan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi tambahan bila diperlukan. Selama proses mengecilkan data, peneliti menyusun ringkasan dan mencari informasi yang relevan dan signifikan. Karena dianggap tidak relevan, informasi yang tidak berkaitan dengan pokok bahasan tidak akan dicantumkan.

3.6.2 Penyampaian Data

Penyampaian data Dalam penelitian kualitatif, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan format sejenis lainnya. Data disajikan dalam bentuk naratif. Pemahaman menjadi lebih mudah ketika informasi ini disajikan (Sugiono, 201). Peneliti menyajikan data yang dipotong sebelumnya untuk menyusun materi saat membuat data. Lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data saat data disajikan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yang mencakup pemeriksaan berkelanjutan selama penyelidikan. Menurut Akbar PS (2011: 87), peneliti harus menarik kesimpulan dan memverifikasi signifikansi dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek dimana penelitian dilakukan. urutan tindakan untuk analisis data. Penulis akan mendefinisikan antara data penting dan data yang belum diperoleh sejak awal penelitian. Dengan menganalisis hubungan antara kesamaan antara data, penulis akan menemukan informasi yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian dan harus ditetapkan dalam kesimpulan. Adapun kesimpulan skripsi ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Kriteria validitas data yang diperoleh adalah validasi data . Dalam penelitian kualitatif, data atau hasil dianggap valid jika tidak ada ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya dialami subjek dengan apa yang dikatakan peneliti. Data kualitatif harus dikumpulkan sejak awal, yaitu mengolah data, menampilkannya, dan membuat penilaian atau memeriksanya. Konsep validitas internal dan realitas pada dasarnya digantikan dengan kriteria untuk menentukan derajat kepercayaan (reliability). Tujuan kriteria ini adalah sebagai berikut: (1) melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dicapai tingkat kepercayaan terhadap hasil; (2) menunjukkan kehandalan hasil pemeriksaan penyidik terhadap beberapa fakta

yang diselidiki. Metode penelitian didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Tiga kriteria digunakan untuk memeriksa validitas data kualitatif:

3.7.1 Perpanjangan Periode Pengamatan

Yaitu. partisipasi dalam proses penelitian. Meningkatkan partisipasi peneliti meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Partisipasi yang meningkat mengharuskan peneliti untuk menghabiskan banyak waktu untuk kembali ke lokasi penelitian dan mewawancarai kembali sumber yang ada dan yang baru yaitu, menemukan dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mencemari data. Di sisi lain, itu menciptakan kepercayaan pada peneliti dan kepercayaan pada peneliti sendiri.

3.7.2 Ketekunan/Konsistensi Pengamatan

Menurut Sugiyono (2016), peningkatan ketekunan berarti pengamatan yang lebih cermat dan terus-menerus. Peneliti mencoba menentukan ciri-ciri dan faktor-faktor situasi yang relevan dan menyesuakannya dengan fokus penelitian yang diberikan, yaitu mengenai proses asosiasi dan pola asosiasi. Peneliti kemudian menulisnya secara detail dan observasi diperoleh dengan informan dari dinas sosial, pendamping dan masyarakat yang menerima BPNT.

3.7.3 Dalam Uji Reliabilitas

Sugiyono (2016) mendefinisikan triangulasi sebagai proses verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. sehingga informasi yang terkumpul melalui penggunaan metode triangulasi lebih konsisten, lengkap, dan dapat dipercaya. Untuk menentukan keabsahan data, ada tiga jenis triangulasi: a) Triangulasi Sumber; b) Triangulasi Teknik c) Triangulasi Waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknis untuk mengetahui tingkat kepercayaan. Proses pencarian data dari berbagai sumber yang masih berkaitan ini dikenal dengan istilah “triangulasi sumber”. Temuan wawancara dengan berbagai sumber, serta literatur dan pengamatan yang diperoleh, dibandingkan oleh peneliti. Selain itu, fokus penelitian didukung oleh pengamatan dan dokumen yang ada di lapangan. Triangulasi teknis adalah proses

menggabungkan data dari berbagai sumber data yang berbeda dan metode yang sudah digunakan. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data atau informasi dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari sistem pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program BPNT di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah terlaksana namun masih belum baik karena penyaluran belum tepat sasaran sehingga banyak terdapat kendala. Masalah ketidaktepatan sasaran ini dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu doublenya penerima bantuan hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan sosial ganda terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan serta Bukan penerima PKH atau BPNT.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran penelitian meliputi :

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat agar lebih ditingkatkan pembaharuan data atau daftar penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) sehingga penerima manfaat benar-benar penduduk yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di Kelurahan Kelapa Tiga. Selain itu untuk lebih memperhatikan kelancaran penyaluran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan peningkatan kerja sama.
2. Sosialisasi dan koordinasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kelapa Tiga lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerima informasi terkait bantuan pangan non tunai (BPNT).
3. Perlunya menetapkan kriteria khusus dalam proses penentuan penerima program BPNT agar tidak terjadi kecemburuan dalam masyarakat.
4. Penyediaan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 175-190.
- Alimah, A. I. (2020). Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non TUNAI (BPNT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahteraan di kecamatan skripsi oleh Ilma Alimah Akmal Program Studi Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Washiyah Volume 1 No 2*.
- Amali, Y. A. (2020). *Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penangulangan Kemiskinan di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA).
- Bororing, T., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2016). *pengawasan dinas sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modinding*. 2(2), 1–23.
- Dini, A. R., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*.
- Eko Yudianto, Y. (2019). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *reformasi*, 9(2), 138-152.
- Eri Hariyanto (2017), *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gava Media.
- Fahrudin, Adi. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Berdampak COVID-19. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Macpal, S. Y., Nayoan, H., & Rachman, I. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.

- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Im Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-W Kelurahan Sumpatkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi P Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158. <https://doi.org/10.55499/intelektu>
- Mulyadi, Deddy, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, B Alfabeta, Edisi Revisi.
- Muthia Indah Lihardi, H. T. R. F. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7521–7526.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rosalina, A., & Harjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96–111. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.13>.
- Wardana, B. K., & Suharto, S. (2017). *Hubungan pendidikan dan pengetahuan peserta bpjs di kelurahan rowosari dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas rowosari* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Wiwit, W., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 1-12.
- Wiyaka, A., & Murti, E. (2020). Model Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perlindungan Sosial di Kecamatan.2, 2300–2312.
- Wulansari, A., & Subriadi, A. P. (2017). Developing Citizen Relationship Management (CiRM) Oriented E-Government Maturity Model. *IPTEK Journal of Engineering*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.12962/joe.v3i1.2268>
- Yen Gustiance, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/Mdgs) di Kota Bandar Lampung”. Tesis Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2019.

Sumber Website :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sosial RI 2021. (<https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Laporan&op=detail&i>) Diakses pada tanggal 22 februari 2023 pukul 16.31 wib

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program BPNT Kementerian Sosial RI Tahun 2021. (<https://bpnt.kemensos.go.id/wp-content/uploads/2021/06/1.-Pedoman-Monitoring-dan-Evaluasi-BPNT-Tahun-2021.pdf>). Diakses pada tanggal 22 februari 2023 pukul 19.00 wib